

Foreign Aid Cina Kepada Laos dalam Upaya Memberantas Perdagangan Obat-Obatan Terlarang di Wilayah Golden Triangle Melalui Safe Mekong Joint Operation Periode 2022-2025

Adelita Diaz Sasangka¹, Vania Faadhilah Khansa², Muhammad Hanif Abidin³

^{1,2,3} Departemen Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Article Info

Article History

Received: 26 April 2026;

Revised: 12 June 2026;

Accepted: 22 June 2026;

Published: 30 June 2026.

How to cite: Sasangka, A. D., Khansa, V. F., & Abidin, M. H. (2026). Foreign aid Cina kepada Laos dalam upaya memberantas perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle melalui Safe Mekong Joint Operation periode 2022–2025. *Journal of International Relations Diponegoro*, 11(1), 135–152. <https://doi.org/10.14710/jirud.v11i1.58457>

*Email:24044010067@stud
ent.upnjatim.ac.id

Abstract

Transnational organized crime, such as illegal drugs, appears recently as a modern, non-traditional threat in the Southeast Asia region, especially in the hub of crime, Golden Triangle. The drug trafficking happening in the Golden Triangle region utilizes the Mekong River as its main route when doing criminal activity. Geographically, the downstream part of the Mekong River located in China's territory has resulted in them joining an initiative to build collaborative forces with Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, and Cambodia, and to be involved in a joint patrol activities on the Mekong River called the Safe Mekong Joint Operation. This research uses qualitative explanatory research method by taking data from secondary sources such as books, journal articles, internet sites, and report documents. This research focuses on analyzing China's motives in providing foreign aid to Laos as a member country in the implementation of the Safe Mekong Joint Operation for the 2022-2025 period. China's motives in providing foreign aid to Laos in this research is analyzed based on the concept of foreign aid defined by Maria Andersson by categorizing it into economic motive and strategic motive types based on the foreign aid's characteristics and China's accompanying political intentions.

Keyword: Foreign Aid, China, Laos, Drugs, Golden Triangle.

Abstrak

Kejahatan lintas batas seperti perdagangan obat-obatan terlarang muncul sebagai ancaman non-tradisional di kawasan Asia Tenggara, khususnya di wilayah Golden Triangle. Perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle memanfaatkan aliran Sungai Mekong sebagai jalur utamanya. Secara geografis, hilir Sungai Mekong yang terletak di wilayah Cina menghasilkan inisiatif untuk membangun kerja sama dengan Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, dan Kamboja, dalam kegiatan patroli gabungan di Sungai Mekong yang disebut dengan Safe Mekong Joint Operation. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif kualitatif dengan mengambil data dari sumber sekunder, seperti buku, artikel jurnal, situs internet, dan dokumen laporan. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada Laos sebagai salah satu negara anggota dalam pelaksanaan Safe Mekong Joint Operation periode 2022-2025. Analisis motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada Laos dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep *foreign aid* yang dikemukakan oleh Maria Andersson dengan mengkategorikannya dalam jenis economic motive dan strategic motive berdasarkan karakteristik *foreign aid* dan niat politik Cina yang membersamainya.

Keyword: Foreign Aid, Cina, Laos, Narkoba, Golden Triangle.

PENGANTAR

Dinamika keamanan regional di Asia Tenggara telah mengalami pergeseran dalam beberapa dekade terakhir dengan didominasi oleh ancaman keamanan non-tradisional (Amar, 2025). Salah satu bentuk ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi negara-negara di Asia Tenggara adalah kejahatan lintas batas seperti perdagangan obat-obatan terlarang. Perdagangan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara berpusat di Golden Triangle, yaitu wilayah pegunungan berbentuk segitiga seluas 950 km persegi yang mencakup perbatasan Laos, Myanmar, dan Thailand (BNN, 2024). Laos dikenal sebagai pemasok heroin, ganja, opium, dan metamfetamin di pasar gelap, Myanmar sebagai pusat produksi opium, dan Thailand sebagai produsen ekstasi, sabu-sabu, serta narkotika cair lainnya. Aktivitas produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle memanfaatkan Sungai Mekong sebagai jalur perdagangan utama yang telah digunakan selama kurang lebih 70 tahun (Fathurahman, Lubis, & Gustianti, 2025). Maraknya aktivitas ilegal yang terjadi di wilayah Golden Triangle dipengaruhi oleh faktor sosio-ekonomi dan politik yang kompleks, seperti kemiskinan, tingkat pembangunan yang belum merata, perbedaan suku dan ras, serta adanya konflik yang sedang berlangsung (ASEAN, 2024).

Pada 2022, produksi obat-obatan sintesis ilegal seperti ketamin dan metamfetamin juga semakin meluas di negara-negara berpenghasilan rendah, termasuk di Asia Tenggara yang mayoritas penggunaannya bersifat non-medis. Obat-obatan sintesis jenis baru bernama happy water dan k-powdered milk pertama kali muncul di Asia Tenggara, kandungannya berisi ketamin yang dicampur dengan berbagai macam zat psikoaktif lainnya (UNODC, 2022). Pada 2023, terjadi penyitaan metamfetamin secara global mencapai 482 ton, dengan 80% di antaranya berasal dari Asia Tenggara, Asia Timur, dan Amerika Utara. Banyaknya produksi metamfetamin di Asia Tenggara menjadikannya sebagai penyebab gangguan kesehatan utama di kalangan pengguna narkoba, yakni 70% pengguna narkoba di Asia Tenggara yang direhabilitasi telah terindikasi mengkonsumsi metamfetamin (UNODC, 2025). Dampak negatif dari perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle mendorong negara-negara di sekitarnya, yakni Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam, untuk melakukan kerja sama melalui Safe Mekong Joint Operation (UNODC, 2009).

Safe Mekong Joint Operation adalah kerja sama patroli gabungan yang dilaksanakan setiap tahun di sepanjang aliran Sungai Mekong sebagai upaya memberantas perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle (ASEAN, 2024). Kerja sama ini mulanya diinisiasi oleh Cina pada 2013 sebagai bagian dari ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs periode 2016-2025, melibatkan Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Tidak hanya berperan sebagai inisiator, kontribusi Cina dalam Safe Mekong Joint Operation juga dapat dilihat melalui pemberian *foreign aid* kepada negara-negara anggota untuk mendukung efektivitas operasi dan memperkuat kapasitas keamanan masing-masing negara. Cina dikenal aktif memberikan *foreign aid*, baik dalam bentuk bantuan pembangunan, kerja sama keamanan, hibah infrastruktur, pinjaman bebas bunga, maupun dukungan kemanusiaan kepada berbagai negara berkembang sejak tahun 1950-an, yang salah satu penerimanya adalah Laos (Lum, Fischer, Granger, & Leland, 2009). Dalam konteks Safe Mekong Joint Operation, meskipun *foreign aid* Cina dinilai dapat membantu menciptakan stabilitas dan keamanan regional, muncul pandangan lain bahwa *foreign aid* tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bagi Cina untuk

memperluas pengaruh ekonomi dan politiknya di kawasan. Perbedaan pandangan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang mengapa Cina memberikan *foreign aid*, khususnya kepada Laos, dalam upaya memberantas perdagangan obat-obatan terlarang di Golden Triangle melalui Safe Mekong Joint Operation.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motif pemberian *foreign aid* Cina kepada Laos dalam upaya memberantas perdagangan obat-obatan terlarang di Golden Triangle melalui Safe Mekong Joint Operation periode 2022-2025. Laos dipilih menjadi subjek penelitian karena Laos merupakan satu dari tiga negara di wilayah Golden Triangle yang terkoneksi langsung dengan aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara, yang mana Laos berperan sebagai produsen opium terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Myanmar. Perdagangan obat-obatan terlarang di wilayah Golden Triangle dan Safe Mekong Joint Operation dipilih menjadi konteks spesifik dalam penelitian ini karena Golden Triangle menciptakan ancaman keamanan lintas batas yang mendorong Cina dan Laos untuk bekerja sama melalui Safe Mekong Joint Operation hingga terjadi interdependensi di dalamnya. Tahun 2022-2025 dipilih menjadi rentang periode penelitian karena pada periode ini terjadi peningkatan signifikan dalam pembongkaran kasus perdagangan obat-obatan terlarang melalui Safe Mekong Joint Operation (ASEAN, 2023). Selain itu, pada periode ini, Safe Mekong Joint Operation juga memperluas cakupan operasinya hingga ke ranah kejahatan digital (Xinhua, 2026). Pada periode ini pula Laos mengalami krisis utang akibat proyek BRI China-Laos Railway 2015-2021 yang beroperasi penuh pada 2022, sehingga bertambahnya bantuan dari Cina akan berpotensi memperkuat hegemoni Cina terhadap Laos (IMF, 2025).

Analisis motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada Laos dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan konsep *Foreign Aid* oleh Maria Andersson, di mana ia mendefinisikan *foreign aid* sebagai sebuah mekanisme kerja sama internasional untuk tujuan pembangunan dan kemanusiaan yang diikuti oleh motif kepentingan politik dan ekonomi negara donor. Andersson kemudian membagi motif dibalik pemberian *foreign aid* menjadi enam jenis, yakni *humanitarian*, *economic*, *strategic*, *ideology*, *identity*, dan *environment*. *Humanitarian motive* dilihat sebagai upaya negara donor untuk membantu mengurangi kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat di negara penerima. *Economic motive* adalah upaya negara donor untuk mempromosikan perdagangan (*trade*), investasi (*investment*), dan ekspor (*export*) dengan membantu negara penerima untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional. *Strategic motive* adalah upaya negara donor untuk menangani ancaman keamanan yang membahayakan kepentingan nasionalnya dengan membangun hubungan kerja sama (*bonding*), pembukaan kedutaan besar (*embassies*), membangun aliansi keamanan (*security alliances*), dan menjaga perdamaian dan keamanan global (*peace and security*) (Andersson, 2009).

Ideology motive adalah keinginan negara donor dalam menyebarkan nilai-nilai tertentu yang dianutnya ke negara penerima, seperti demokrasi, HAM, dan sistem politik yang terbuka. *Identity motive* berkaitan dengan tujuan negara donor untuk membangun citra dan reputasinya di mata komunitas internasional. *Environment motive* adalah upaya negara donor untuk membantu negara penerima menangani masalah perubahan iklim melalui pembentukan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab internasional terhadap lingkungan global. Secara keseluruhan, Andersson menyimpulkan bahwa pemberian *foreign aid* secara murni tanpa diikuti oleh motif kepentingan negara donor merupakan suatu hal yang jarang terjadi. Oleh karena itu,

dalam konteks Safe Mekong Joint Operation, pemberian *foreign aid* Cina kepada Laos sangat mungkin dipengaruhi oleh *economic motive* dan *strategic motive* Cina untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dari ancaman keamanan berupa aktivitas perdagangan obat-obatan terlarang di Golden Triangle melalui aliran Sungai Mekong.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini disusun dengan melakukan tinjauan literatur terhadap lima penelitian terdahulu dengan topik pembahasan yang sama terkait motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada negara-negara di Asia Tenggara. Penelitian oleh Kim (2021) menjelaskan alokasi *foreign aid* Cina ke negara-negara di Asia Tenggara dengan membandingkannya terhadap *foreign aid* dari negara-negara Barat. Penelitian ini menyebutkan bahwa pemberian *foreign aid* Cina dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan politik strategis yang kerap bertentangan dengan norma-norma internasional yang dipromosikan oleh negara-negara Barat, misalnya demokrasi dan HAM. Secara politik, alokasi *foreign aid* Cina cenderung menyasar negara-negara berkembang dengan pemerintahan yang korup dan tidak stabil. Dalam memberikan *foreign aid*nya, Cina memegang prinsip non-intervensi yang menguntungkan pemerintah otoriter di negara penerima karena tidak ada syarat reformasi politik yang membersamainya (Kim, 2021). Secara ekonomi, mayoritas *foreign aid* Cina terkonsentrasi pada sektor infrastruktur melalui Belt and Road Initiatives (BRI) sebagai alat untuk membuka jembatan ke pasar baru bagi perusahaan-perusahaannya. Singkatnya, Cina belum menunjukkan tanda-tanda akan mengikuti norma internasional dalam memperjuangkan demokrasi atau HAM melalui *foreign aid*nya, melainkan lebih fokus pada keuntungan timbal balik yang mengakomodasi kepentingan nasionalnya.

Penelitian oleh Johnston (2018) melalui artikelnya yang berjudul “China’s Belt and Road Initiative: Economic Motivations and Global Development” bertujuan untuk menjelaskan motif ekonomi dibalik pemberian *foreign aid* Cina dalam bentuk BRI. Dalam sejarahnya, BRI diluncurkan ketika Cina menghadapi tantangan berupa populasi usia produktif yang menua sebelum negaranya menjadi kaya. Melalui BRI, Cina berusaha untuk menyalurkan kelebihan kapasitas industri dan modalnya ke negara-negara dengan populasi produktif yang tinggi dan memiliki kebutuhan infrastruktur yang besar seperti Asia Tenggara dan Afrika (Johnston, 2018). Selain itu, BRI juga berfungsi sebagai alat untuk melakukan internasionalisasi terhadap mata uang Renminbi (RMB), di mana pendanaan BRI yang menggunakan mekanisme modal konsesi bertujuan untuk membangun hubungan ekonomi dan membuka peluang investasi baru di negara-negara berkembang. BRI yang mengutamakan pembangunan infrastruktur menciptakan konektivitas geografis yang menghubungkan provinsi-provinsi di pedalaman Cina yang masih miskin dengan negara-negara tetangga untuk mendorong pembangunan regional dan mengentaskan kemiskinan domestik. Secara keseluruhan, BRI tidak hanya berperan sebagai instrumen *foreign aid*, tetapi juga platform strategis dan pragmatis bagi Cina untuk memajukan ekonomi domestiknya dan memperkuat perannya dalam pembangunan dunia secara global (Johnston, 2018).

Penelitian oleh Mirajiah (2022) melalui penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan motif sosial, politik, dan ekonomi yang melatarbelakangi diberikannya *foreign aid* Cina kepada negara-negara di Asia Tenggara. Selama pandemi Covid-19, Cina tercatat sebagai negara pendonor *foreign aid* terbesar di Asia Tenggara dengan jenis *humanitarian aid*, yakni bantuan

berupa masker, vaksin, peralatan medis, dan alat pelindung diri. Selain itu, pada 2020, Cina juga berdonasi sebesar 50 juta USD kepada WHO dan telah menyalurkan *emergency aid* kepada lebih dari 150 negara lainnya (Mirajiah, 2022). Di balik fakta bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi segala aspek dalam kehidupan, kondisi ini juga menciptakan kesempatan bagi Cina untuk bangkit sebagai kekuatan besar yang bersaing dengan Amerika Serikat dalam memperkuat hegemoninya di Asia Tenggara. Motif sosial Cina dalam memberikan *foreign aid* berkaitan dengan keberadaan masyarakat beretnis Tionghoa di beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, di mana mereka dapat memberikan keuntungan bagi Cina secara ekonomi melalui perdagangan (Mirajiah, 2022). Sementara itu, motif politik Cina adalah keinginannya untuk memperluas pengaruh politik dan ideologinya di Asia Tenggara melalui program China's Health Diplomacy di bawah skema Health Silk Road (HSR) yang merupakan bagian dari proyek BRI. Sedangkan motif ekonominya sendiri dapat dilihat ketika Cina membangun hubungan kerja sama multilateral melalui program CAFTA, FTA, ARF, dan JCC untuk memperkuat pengaruh ekonominya di Asia Tenggara.

Penelitian oleh Demir (2023) melalui artikelnya yang berjudul "The Effect of China: The BRI Project in Myanmar" bertujuan untuk menjelaskan tentang bagaimana Cina menggunakan BRI sebagai alat untuk memperluas pengaruh geopolitik dan ekonominya di Myanmar. Cina dan ASEAN memiliki hubungan interdependensi yang erat dalam bidang ekonomi. Cina merancang kebijakan luar negerinya menjadi lebih terbuka terhadap ASEAN, salah satunya dengan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur kepada negara-negara berkembang yang disebut dengan BRI. Adanya BRI tersebut lantas membentuk persepsi bahwa Cina adalah negara tetangga yang baik. Akan tetapi, BRI juga menimbulkan jebakan utang yang mengancam kedaulatan masing-masing negara penerima bantuan. Kasus ini dirasakan pula oleh Myanmar sebagai negara penerima BRI dengan proyek pembangunan Kyaukphyu Deep Sea Port. Melalui proyek tersebut, Cina berusaha untuk mengamankan akses langsung ke Samudra Hindia guna menghindari kemacetan maritim tradisional. Secara keseluruhan, hubungan bilateral antara Cina dan Myanmar tersebut kemudian menciptakan gesekan diplomatik di ASEAN, di mana negara-negara anggota kesulitan untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonominya dengan kekhawatiran akan meningkatnya hegemoni Cina.

Penelitian oleh Chhin-Eng & Siriwato (2024) menjelaskan adanya motif Cina untuk memperkuat hegemoni dan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan memancing dukungan politik dari Kamboja melalui pemberian *foreign aid*. Kondisi Kamboja yang kesulitan untuk membangun kembali negaranya akibat kekurangan sumber daya pasca kolonialisme Prancis membuatnya bergantung pada pemberian *foreign aid* dari negara lain. Sementara itu, Cina sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia aktif memberikan *foreign aid* kepada negara-negara berkembang, berupa hibah, pinjaman tanpa syarat, dan program pembangunan. Dari total *foreign aid* yang diterima oleh Kamboja, sebagian besarnya merupakan pemberian Cina. Sejak 2010-2014, *foreign aid* Cina yang berasal dari BRI digunakan untuk mendanai 14 proyek domestik di Kamboja yang meliputi sektor pemerintahan hingga sipil (Chhin-Eng & Siriwato, 2024). Akan tetapi *foreign aid* Cina kemudian menimbulkan dependensi dan potensi jebakan utang bagi Kamboja. Ditemukan pula bahwa *foreign aid* Cina memengaruhi arah kebijakan luar negeri Kamboja menjadi pro Cina dan mengganggu terbentuknya *good governance* di Kamboja, di mana pinjaman tanpa syarat dari Cina memungkinkannya Kamboja untuk bebas

mengabaikan sanksi Barat yang menuntut adanya penguatan demokrasi di Kamboja (Chhin-Eng & Siriwato, 2024).

Secara keseluruhan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam kelima penelitian tersebut. Persamaan dalam kelima penelitian tersebut terletak pada fokusnya untuk menjelaskan motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Kelimanya sepakat bahwa *foreign aid* Cina tidak diberikan secara murni, melainkan didorong oleh motif politik dan ekonomi untuk memperkuat hegemoninya di kawasan. Kelimanya juga menyebutkan bahwa Cina kerap menggunakan BRI sebagai salah satu instrumen utama dalam memberikan *foreign aid* yang menimbulkan risiko dependensi dan potensi perangkap utang yang dapat mengancam kedaulatan negara penerima. Sementara itu, perbedaan dari kelima penelitian tersebut terletak pada konteks spesifik yang dibahas, yakni bahwa penelitian pertama memberikan analisis komparatif terhadap alokasi *foreign aid* Cina; penelitian kedua menganalisis motivasi Cina dalam meluncurkan BRI berdasarkan sejarah ekonomi, demografi, dan geografi; penelitian ketiga memberikan gambaran luas tentang *foreign aid* Cina saat pandemi Covid-19 di lingkup regional Asia Tenggara; penelitian keempat memberikan kritik terhadap dampak *foreign aid* Cina terhadap integritas politik Kamboja; dan penelitian kelima menyoroti ambisi geospasial Cina dengan membangun konektivitas infrastruktur di Myanmar. Dari kelima penelitian tersebut belum ada pembahasan yang berfokus pada hubungan Cina dan Laos. Dengan demikian, disusunnya penelitian ini akan memberikan kebaruan untuk melengkapi lima penelitian sebelumnya dengan berfokus pada motif Cina dalam memberikan *foreign aid* kepada Laos dengan konteks spesifik kerja sama Safe Mekong Joint Operation.

METODE RISET

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif berdasarkan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan sebab-akibat dan proses dari terjadinya suatu fenomena. Teknik pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan melalui dokumentasi dengan memanfaatkan sumber sekunder, yang mana data diperoleh dari narasumber secara tidak langsung melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian (Wekke, 2019). Bentuk dokumenter yang termasuk dalam contoh sumber sekunder di antaranya autobiografi, buku, memorial, catatan, dan dokumen pemerintah maupun swasta. Dalam penelitian ini, data utama yang menjadi sumber sekunder mengacu pada dokumen, laporan, dan berita resmi yang dirilis oleh Pemerintah Cina, Pemerintah Laos, ASEAN, dan organisasi internasional lainnya yang relevan dengan konteks pembahasan. Di samping itu, terdapat pula data pendukung yang diambil dari kumpulan artikel jurnal. Data-data yang dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder tersebut akan diolah menjadi kata-kata yang menjelaskan motif *foreign aid* Cina kepada Laos dalam upaya memberantas perdagangan obat-obatan terlarang di Golden Triangle melalui Safe Mekong Joint Operation.

PEMBAHASAN

Perdagangan obat-obatan terlarang di Golden Triangle telah menciptakan ancaman keamanan yang serius, tidak hanya bagi negara-negara di Asia Tenggara, tetapi juga Cina yang terletak di Asia Timur. Hal ini disebabkan karena perdagangan obat-obatan terlarang di Golden

Triangle terjadi secara lintas batas dengan memanfaatkan aliran Sungai Mekong. Kerja sama tersebut diberi nama Safe Mekong Joint Operation dan dibentuk pada 2013 sebagai bagian dari ASEAN Work Plan 2016-2025, di mana Kamboja dan Vietnam turut bergabung di dalamnya pada 2016 (ASEAN, 2024). Melalui Safe Mekong Joint Operation, Cina turut menyalurkan *foreign aid*nya kepada negara-negara anggota untuk memastikan program patroli sungai berjalan lancar sesuai rencana, termasuk Laos. Meskipun demikian, pemberian *foreign aid* oleh Cina tidak semata-mata demi mendukung kelancaran program saja, tetapi juga dibersamai oleh motif lain di baliknya, yakni motif ekonomi dan motif strategis.

Motif Ekonomi

Pada periode 2022-2025, Cina bertahan menjadi satu dari tiga mitra dagang terbesar Laos. Kegiatan perdagangan yang terjadi antara Cina dan Laos bertujuan untuk memperkuat keselarasan strategis. Dalam Action Plan for the China-Laos Community with a Shared Future 2024-2028, keduanya bersama-sama menerapkan peraturan tarif nol untuk 98% hasil produksi Laos yang diekspor ke Cina demi mendorong perkembangan hubungan ekonomi dan perdagangan yang sehat dan berkelanjutan, serta merupakan perwujudan dari rencana kerja sama ekonomi dan perdagangan bilateral yang komprehensif antara kedua negara (YCIH, 2023). Terdapat pula keterlibatan bidang pembangunan pada motif bantuan ini, yakni Laos dan Cina yang berkolaborasi dalam berbagai proyek yang didanai oleh Cina, termasuk pengadaan proyek E-Commerce untuk mempromosikan produk pertanian Laos (Kheuakham Chanlivong, 2025). Adanya *e-commerce* sebagai bentuk perluasan dan perkembangan perdagangan bilateral antara Cina dan Laos, di mana Cina secara aktif mempromosikan produk pertanian antara kedua negara melalui *e-commerce* tersebut, mendukung Laos untuk berpartisipasi dalam perdagangan melalui China International Import Expo, dan terus memperluas ekspor produk pertanian dan makanan berkualitas tinggi dari Laos ke Cina (YCIH, 2023).

Investasi Cina kepada Laos berfokus pada tiga sektor utama, yakni pertambangan, infrastruktur, dan energi. Pada sektor pertambangan, Laos dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh daratan dengan cadangan mineral yang melimpah, seperti emas, tembaga, timbal, timah, besi, bauksit, lignit, dan kalium. Sejak tahun 1986-2000, Pemerintah Laos selalu memprioritaskan eksplorasi tambang dan mineral untuk menarik investor asing, yang sebagian besar merupakan perusahaan tambang asal Cina (Dicarlo & Lu, 2025). Aktivitas pertambangan di Laos yang difasilitasi oleh perusahaan Cina dapat dilihat pada tiga tambang terbesar di Laos, yakni Tambang Phu Kham, Tambang Ban Houayxai, dan Tambang Sepon. Tambang Phu Kham dan Tambang Ban Houayxai yang menghasilkan tembaga dan emas beroperasi di bawah Phu Bia Mining Company Limited. Sebanyak 90% saham Phu Bia dimiliki oleh PanAust, anak perusahaan Guangdong Rising H.K. Limited, dan 10% sisanya dimiliki oleh Pemerintah Laos.

Sementara itu, Tambang Sepon yang juga menghasilkan tembaga dan emas beroperasi di bawah Lane Xang Minerals Limited, di mana 90% sahamnya dimiliki oleh Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd dan 10% sisanya dimiliki oleh Pemerintah Laos. Pada 2019, sebanyak 36% dari total ekspor Laos merupakan produk hasil tambang yang dikirim ke Cina. Pada 2022, setelah harga produk hasil tambang meningkat secara global, Xiamen Tungsten Corporation membentuk *joint venture* dengan Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd untuk melakukan eksplorasi tanah jarang di Laos, sedangkan China EXIM Bank berencana untuk memberikan

pinjaman modal kepada Lao Kaiyuan Mining Co. Ltd untuk menjalankan proyek pertambangan kaliumnya. Selain mineral, perusahaan asal Cina tersebut juga menambang pasir dari Sungai Mekong untuk diolah menjadi semen guna mendukung proyek infrastruktur BRI.

Pada sektor infrastruktur, Cina berinvestasi melalui proyek China-Laos Railway sebagai bagian dari China-Laos Economic Corridor di bawah BRI. Dibangun pada 2015-2021, proyek China-Laos Railway mulai beroperasi penuh pada 2022, berupa jalur kereta api sepanjang 414 km yang menghubungkan Vientiane, Ibu Kota Laos, dan Boten, sebuah kota di perbatasan utara Cina, dengan waktu tempuh kurang dari empat jam (The World Bank, 2020). Dari Boten, jalur kereta api dilanjutkan hingga ke Kunming sepanjang 595 km, menciptakan konektivitas darat antara Laos dengan pusat regional Cina di Provinsi Yunnan. Per September 2024, jalur kereta api ini telah menjadi sarana untuk memindahkan 10 juta ton barang dagang dan memfasilitasi 3 juta perjalanan, termasuk untuk kepentingan pendidikan, bisnis, dan pariwisata bagi turis mancanegara (Sgueglia, 2025). Proyek ini selain memberikan manfaat bagi Laos untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga bermanfaat bagi Cina untuk membuka akses perdagangan ke pasar ASEAN melalui Laos.

Pada sektor energi, terdapat setidaknya setengah dari total proyek pembangkit listrik tenaga air di Laos, seperti bendungan, jalur transmisi, gardu listrik, dan grid perbaikan dibiayai oleh China Development Bank dan China EXIM Bank (Dicarlo & Lu, 2025). Salah satu contohnya adalah Nam Ou River Hydropower Cascade, yakni proyek pembangkit listrik tenaga air di Sungai Nam Ou, anak Sungai Mekong, yang terdiri dari tujuh bendungan dengan kapasitas pembangkit listrik gabungan sebesar 1,27 GW. Proyek ini menjadikan Laos sebagai penyuplai listrik bagi negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand dan Vietnam.

Dalam kegiatan ekspor-impor, Laos cenderung dominan dengan menjadikan Cina sebagai salah satu pasar ekspor utama. Laos tidak hanya mengekspor produk mineral seperti tembaga dan emas, tetapi juga produk pertanian, seperti sayur, buah, dan pupuk kalium (Sgueglia, 2025). Adanya peningkatan konsumsi di antara masyarakat kelas menengah di Cina mendorong terjadinya kerja sama antara Pemerintah Provinsi Xayaboury dengan perusahaan Cina, di mana para petani lokal diminta untuk menanam lebih banyak ketela, jagung, teh, kacang-kacangan, semangka, dan pir untuk diekspor ke Cina (Vientiane Times, 2024). Kerja sama ini bermanfaat bagi Laos untuk menciptakan lapangan pekerjaan sekaligus membentuk ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap sayur dan buah-buahan impor. Ekspor Laos ke Cina pada 2024 tercatat mencapai 4.16 miliar USD, sedangkan ekspor Cina ke Laos pada 2024 hanya sebesar 3.19 miliar USD (OEC, 2024). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Laos mengalami surplus dalam perdagangan bilateralnya dengan Cina.

Meskipun neraca dagang Cina terhadap Laos mengalami defisit karena tingginya impor komoditas Laos, kondisi tersebut tidak serta-merta merugikan Cina. Hal ini disebabkan karena Laos masih memiliki ketergantungan terhadap produk Cina, seperti mesin, alat elektronik, dan kendaraan yang menjadi penunjang distribusi ekspor Laos melalui jalur darat (ITC, 2025). China-Laos Railway yang menjadi salah satu jalur darat Laos dibangun di bawah BRI dan dibiayai oleh pinjaman dari Cina. Mekanisme ini meningkatkan beban utang luar negeri Laos hingga menimbulkan krisis utang pada 2024 (IMF, 2025). Akibatnya, Pemerintah Laos harus mengalokasikan sebagian besar pendapatan negara untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada Cina. Kondisi tersebut memperkuat posisi tawar Cina terhadap Laos, karena

ketergantungan finansial yang tinggi membuat ruang gerak ekonomi dan politik Laos menjadi terbatas. Dengan demikian, keuntungan Cina tidak hanya berasal dari perdagangan, tetapi juga dari hubungan dependensi ekonomi dan utang yang memperkuat pengaruh Cina di Laos.

Motif Strategis

Bentuk kelembagaan awal dalam upaya anti-narkoba oleh Cina adalah keikutsertaannya pada penandatanganan *MoU on Drug Control in the Sub-Region* pada 26 Oktober 1993 bersama Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan UNDCP sebagai mekanisme kerja sama penanganan narkoba di wilayah Mekong (UNODC, 2017). Pada tahun yang sama, Cina dan Laos secara khusus menandatangani perjanjian kerja sama bilateral dalam upaya penanganan perdagangan narkoba (KPL, 2025). Kerangka kerja sama dalam MoU tahun 1993 tersebut berkembang menjadi *Mekong MoU* pada September 2023. Dalam peringatan 30 tahun perjanjiannya, Sekretaris Jenderal Eksekutif Komisi Nasional Pengendalian Narkoba Cina, Wei Xiaojun, menegaskan mengenai urgensi untuk menangani permasalahan yang disebabkan oleh kelompok kejahatan terorganisir di Golden Triangle, sekaligus mencalonkan Laos sebagai tuan rumah dalam pertemuan Komite Pejabat Senior *Mekong MoU* untuk 2024 (UNODC, 2023). Hal ini dilakukan oleh Cina sebagai tanda kepercayaan kepada Laos untuk menyelenggarakan forum multilateral tersebut. Dalam kesempatan tersebut keenam negara anggota, Kamboja, Cina, Thailand, Myanmar, Laos, dan Vietnam menandatangani *Subregional Action Plan XII* (SAP XII) yang terdiri dari empat fokus: penguatan upaya mengatasi penyalahgunaan narkoba, peningkatan kerjasama penegakan hukum, penguatan kerjasama yudisial internasional, dan promosi program pembangunan alternatif yang berkelanjutan (UNODC, 2023).

Instrumen *embassies* merujuk pada peran representasi diplomatik sebagai bentuk legitimasi serta bertujuan untuk memperkuat hubungan kerja sama antara negara donor dan penerima. Pada 16 Agustus 2024, Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand melakukan pertemuan informal untuk membahas potensi kerja sama dalam melawan kejahatan transnasional yang dikoordinasikan melalui adanya jalur diplomatik masing-masing negara (Ministry of Foreign Affairs, 2024). Selain itu, Kedutaan Cina di Vientiane juga berkontribusi dalam komunikasi antara Pemerintah Cina dan Pemerintah Laos dalam implementasi program-program yang berkaitan dengan Safe Mekong Joint Operation. Cina secara aktif mempromosikan program Safe Passage of the Mekong River melalui kerja sama dengan Myanmar, Laos, Thailand, dan Vietnam, di mana program ini bertujuan untuk menegakkan hukum melalui kerjasama yudisial dan pertukaran intelijen (US-China Embassy, 2024). Pada Juni 2024, pejabat senior Laos hadir pada pertemuan kerja sama anti-narkoba di sub-kawasan Mekong di Provinsi Bokeo, bersama delegasi diplomatik Cina, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar (People's Daily Online, 2024). Hal ini menunjukkan adanya jalur diplomatik yang membantu terlaksananya pengamanan kawasan.

Instrumen *security alliance* diwujudkan melalui dua mekanisme yang saling melengkapi, yakni patroli gabungan di Sungai Mekong dan pembentukan Lancang-Mekong Integrated Law Enforcement and Security Cooperation Center (LMLECC) di Kunming, Provinsi Yunnan. Patroli gabungan dilakukan secara rutin, didukung oleh fasilitas dari LMLECC seperti pengembangan kapasitas personel dan koordinasi intelijen untuk mendukung keberlangsungan patroli secara efektif. Latar belakang dari dibentuknya aliansi keamanan tersebut adalah kasus penyelundupan pil metamfetamin ke Thailand yang menyebabkan tewasnya 13 awak kapal Cina

di aliran Sungai Mekong pada 2011 silam (Szep & Marshall, 2012). Pada 2022, otoritas penegak hukum dari keempat negara melaksanakan 12 patroli gabungan, mengerahkan lebih dari 200 kapal dan 2.700 personel penegak hukum (CGTN, 2023). Pada 28 Juli 2023, enam kapal dan 147 petugas penegak hukum dari keempat negara berhasil melakukan pengamanan pada 711 km perairan dengan operasinya yang memakan waktu selama empat hari dan tiga malam, pada operasi kali ini keempat negara berfokus kepada penindakan lintas batas negara dan memastikan keamanan di sepanjang jalur patroli (People's Daily Online, 2023).

Pada patroli ke 148 pada 24 Desember 2024 lembaga penegak hukum dari Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand mengirimkan sebanyak sembilan kapal dan lebih dari 200 anggota penegak hukum, selain itu terdapat pula latihan operasi gabungan “Vision 2024” di Muong Mom yang mencakup inspeksi di darat dan air, penyelamatan kapal karam, dan pengejaran pelaku kejahatan di perairan (China Daily, 2024). Latihan multidimensi tersebut menunjukkan bahwa aliansi keamanan Mekong berkembang dari patroli sungai rutin hingga dapat melakukan respons darurat yang mencakup skenario operasional. Pada 25 Juli 2025 patroli ke 155 yang dilaksanakan oleh Cina, Laos, Myanmar, dan Thailand berhasil dijalankan, dengan mengerahkan tujuh kapal patroli dan lebih dari 100 personel gabungan selama empat hari tiga malam. Selain patroli keamanan, keempat negara juga melakukan pertukaran informasi pada pertemuan di Kawasan Chiang Saen, Thailand (Ministry of Public Security, 2025).

Indikator *peace and security* menjadi komponen justifikasi utama untuk *foreign aid* Cina, di mana kapasitas penegakan hukum oleh Laos menjadi syarat agar keamanan di Sungai Mekong dapat terjaga. Ketika Laos dapat mencegah aktivitas penyelundupan narkoba di wilayahnya sebelum penyelundupan memasuki perbatasan, beban yang ditanggung oleh aparat penegakan hukum Cina dapat berkurang. Hal ini dapat dibuktikan dengan serangkaian kampanye penindakan dan penertiban yang dilakukan secara terus-menerus, dengan kemajuan yang signifikan dalam pendidikan pencegahan, layanan manajemen yang mencapai hasil memuaskan dalam upaya pengendalian narkoba. Sepanjang tahun, total 37.000 kasus kriminal terkait narkoba berhasil ditangani, 62.000 tersangka ditangkap, 26,7 ton narkoba disita, dan 193.000 pengguna narkoba terdeteksi, yang masing-masing menunjukkan penurunan sebesar 12,9% dan 5,6%, peningkatan sebesar 3%, dan penurunan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, situasi pengendalian narkoba nasional terus membaik (NNCC, 2025). Data tersebut merupakan bukti terwujudnya usaha keamanan yang efektif diselenggarakan oleh kedua negara dari ancaman narkoba.

Foreign Aid Cina kepada Laos

Foreign aid Cina dapat dikategorikan menjadi bantuan yang diberikan untuk pengembangan sektor keamanan dan penegakan hukum, sektor ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor teknis dan energi. Cina memperluas cakupan Safe Mekong Joint Operation dari pemberantasan narkoba yang bersifat tradisional ke pengendalian distribusi narkoba melalui jaringan siber. Bentuk bantuan utama yang diberikan di bidang keamanan dan penegakan hukum ialah adanya patroli bersama rutin untuk menjaga keamanan navigasi di Golden Triangle yang melibatkan ratusan personel dan kapal patroli, baik dari Cina maupun Laos. Selain adanya patroli bersama, bantuan keamanan yang diberikan juga menasar pada bidang teknologi dan intelijen. Personel penegak hukum Laos telah melakukan operasi dan

penangkapan di Sungai Mekong, dengan menggunakan keahlian lokal dan kewenangan yurisdiksi untuk menahan tersangka atas tindak kriminal. Pada 2023, sebuah operasi gabungan dilancarkan oleh Cina dan Laos untuk melancarkan serangan komprehensif terhadap jaringan penipuan telekomunikasi (Global Times, 2026).

Dalam konteks pengembangan kapasitas, Cina secara sistematis memberikan bantuan yang meningkatkan kompetensi personel dan aparat penegak hukum yang menangani kasus perdagangan narkoba di Sungai Mekong. Bantuan yang diberikan berupa pelatihan teknis pada bidang forensik digital untuk menginvestigasi kejahatan siber dan menangani peredaran narkoba jenis baru, didukung oleh kerja sama dengan kepolisian dan peradilan Cina. Pada bidang siber, Cina bersama dengan Laos, Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Vietnam telah sukses menggelar operasi untuk membongkar jaringan perdagangan narkoba transnasional, sehingga mendapatkan pengakuan internasional yang signifikan. Dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi dari personel keamanan tersebut, Cina bersedia menyediakan 5.000 kesempatan pelatihan bagi negara-negara berkembang lainnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan untuk melatih para profesional dalam menangani masalah keamanan global. The People's Public Security University of China menyelenggarakan forum kepolisian internasional tahunan, yang menawarkan kursus bagi petugas kepolisian dari Asia dan Afrika. Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga yang dikelola provinsi: Hubei University of Police menyediakan program pelatihan bagi petugas kepolisian dari Myanmar dan Laos; dan Zhejiang Police College menjadi tuan rumah salah satu program pelatihan Cina-UE pada tahun 2012. (Pina, 2023).

Bantuan ekonomi Cina kepada Laos disalurkan melalui dua mekanisme yakni Lancang-Mekong Cooperation (LMC) dan BRI. Bantuan yang diberikan memperluas kerja sama pragmatis antara Cina dan Laos di bidang-bidang baru, seperti ekonomi digital dan modernisasi sektor pertanian Laos untuk mengintegrasikan Laos sebagai pelaku ekonomi dalam kerja sama ekonomi Cina dan Laos. Pertanian juga menjadi fokus bantuan Cina kepada Laos untuk dibangun dan dikembangkan. Laos dan China bekerja sama untuk mempromosikan pertanian yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lembaga pertanian Laos dan Cina melaksanakan proyek demonstrasi pertanian hijau dan berkelanjutan di 10 provinsi selatan Laos, tepatnya di provinsi Oudomxay, Phongsaly, Bokeo, Luang Namtha, Xayaboury, Luang Prabang, Huphan, Xieng Khuang, Vientiane, dan Xaysomboun dengan menerapkan metode pertanian modern dan mengembangkan lebih banyak varietas benih tanaman yang menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan akan meningkatkan kualitas hasil pertanian serta kapasitas produksi petani di provinsi-provinsi tersebut. Proyek substitusi tanaman ini merupakan langkah penting lainnya dalam kerja sama Cina-Laos dalam mengatasi bahaya narkoba, yang mana menghasilkan keuntungan karena perusahaan-perusahaan Cina yang kemudian berinvestasi dalam penanaman lebih dari 70.000 hektar tanaman komersial seperti karet, tebu, teh, dan lainnya di provinsi Phongsaly dan Oudomxay di Laos utara untuk kemudian di ekspor ke pasar internasional Cina (Vientiane Times, 2024). Hal ini secara langsung menguntungkan puluhan ribu keluarga petani lokal di wilayah Golden Triangle sekaligus menciptakan saluran pendapatan baru bagi petani lokal dan mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di wilayah tersebut (KPL, 2025).

Pada bidang teknis energi dan lingkungan, bantuan yang diberikan bersifat sebagai pelengkap bagi operasi keamanan Safe Mekong Joint Operations, dan dilancarkan melalui

program pembangunan alternatif yang lebih berpihak pada penguatan infrastruktur dan keberlanjutan komunitas. Cina berperan sebagai penyedia fasilitas dan teknologi untuk membantu manajemen sumber daya alam juga mengembangkan proyek mitigasi risiko yang mungkin ditimbulkan di Sungai Mekong. Cina menggunakan teknologi kedirgantaraan dengan memanfaatkan Satelit Beidou dan teknologi penginderaan jauh untuk membantu Laos dalam berbagai bidang, seperti untuk memitigasi bencana banjir dan bencana yang berkaitan dengan aliran Sungai Mekong, memitigasi perubahan iklim dengan mendukung adanya kerja sama menyeluruh di bidang lingkungan ekologi, mengadvokasi pembangunan hijau yang bersifat rendah karbon dan sirkular, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan lingkungan (YCIH, 2023). Bentuk bantuan teknis ini melengkapi operasi keamanan Safe Mekong Joint Operations dengan menciptakan stabilitas sosial-ekonomi di wilayah perbatasan, yang pada akhirnya membantu menekan angka aktivitas peredaran narkoba ilegal.

KESIMPULAN

Ancaman perdagangan narkoba ilegal di Golden Triangle telah mendorong negara-negara sekitarnya untuk membentuk kerja sama komprehensif guna menanggulangnya. Safe Mekong Joint Operation dibentuk untuk membantu negara-negara yang terlibat dalam upaya koordinasi untuk memerangi perdagangan narkoba ilegal. Bantuan luar negeri Cina kepada Laos melalui Safe Mekong Joint Operation tidak hanya berupa bantuan teknis untuk memerangi kejahatan perdagangan narkoba, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Cina untuk melindungi kepentingan ekonominya melalui kerja sama tim dan kolaborasi guna menjamin keamanan Sungai Mekong. Pemberian *foreign aid* oleh Cina diikuti oleh motif ekonomi dan motif strategis.

Motif ekonomi yang diberikan Cina dapat diidentifikasi dari tiga indikator utama, yakni perdagangan (*trade*) yang dapat diidentifikasi dengan upaya donor untuk membantu negara penerima bantuan agar masuk ke dalam pasar internasional dan menghasilkan ketergantungan antara negara donor dan penerima dalam prosesnya, investasi (*investment*) yang ditandai dengan adanya tujuan untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan dari negara donor agar dapat membuka peluang menanamkan investasinya ke negara penerima dan berfungsi untuk memperluas jangkauan pasar bagi perusahaan negara donor, dan indikator ekspor (*export*) yang dapat diketahui ketika pemerintah negara donor berupaya untuk mempromosikan dan menjual barang dan jasa produk domestik dari negara mitra, untuk memastikan industri nasional tetap berlangsung melalui pasar luar negeri. Sedangkan motif strategis adalah motif yang mana merupakan upaya donor untuk menangani ancaman keamanan yang membahayakan kepentingan nasionalnya dengan membangun hubungan kerja sama, membangun kedutaan besar, mengadakan aliansi keamanan, serta memiliki tujuan akhir untuk menjaga perdamaian dan keamanan global. Dalam praktiknya, motif ekonomi dan motif strategis, yang mengutamakan tujuan keamanan, menciptakan sebuah konektivitas secara otomatis antara satu dengan yang lain. Indikator-indikator motif ekonomi dari bantuan yang diberikan Cina menciptakan infrastruktur dan berbagai pembangunan sebagai langkah yang integral. Pembangunan yang digunakan sebagai fondasi ekonomi akan menghasilkan keuntungan bagi negara-negara yang bekerjasama, menciptakan stabilitas kawasan dan muncul urgensi dari segi keamanan untuk menciptakan lingkungan dan ekosistem yang aman demi terjaganya kelancaran

kegiatan ekonomi yang berlangsung. Fenomena ini disebut sebagai *Security-Development Nexus* sebagai instrumen kebijakan luar negeri di mana kepentingan keamanan dan kemakmuran ekonomi dianggap tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fadhilah Permata Nira, M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Bimbingan yang diberikan sangat membantu, sehingga penulis bisa menyelesaikan artikel ini dengan baik. Konten dan isi dalam artikel sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENSI

- Amar, A. (2025). Dinamika Keamanan Regional di Asia Tenggara: Peran ASEAN dalam Menangani Ancaman Non-Tradisional. *TRIWIKRAMA: Jurnal Ilmu Sosial*, 9(11), 1–10. cibangsa.com. <https://doi.org/10.9963/d8b4bv05>
- Andersson, M. (2009). *Motives Behind the Allocation of Swedish Foreign Aid* (pp. 1–38). Goteborg Universitet. Retrieved from <https://gupea.ub.gu.se/server/api/core/bitstreams/1ed31ac6-fa7c-4569-bc3e-a28c2b505511/content>
- ASEAN. (2023). ASEAN Drug Monitoring Report 2022. In *ASEAN* (pp. 1–244). ASEAN. Retrieved from ASEAN website: <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/11/Drug-Monitoring-Report-2022.pdf>
- ASEAN. (2024). ASEAN Cooperation Plan to Tackle Illicit Drug Production And Trafficking In The Golden Triangle 2020 -2022. In *asean.org* (pp. 1–14). ASEAN. Retrieved from ASEAN website: <https://asean.org/wp-content/uploads/2024/05/ASEAN-Cooperation-Plan-2020-2022-ADOPTED.pdf>
- BNN. (2024, September 26). Globalisasi Sebagai Pola Perkembangan Golden Triangle Dalam Perdagangan Narkoba di Kawasan Asia Tenggara. Retrieved May 15, 2026, from BNN website: <https://ntb.bnn.go.id/globalisasi-sebagai-pola-perkembangan-golden-triangle-dalam-perdagangan-narkoba-di-kawasan-asia-tenggara/>
- CGTN. (2023, April 25). 128th joint patrol on Mekong River begins. Retrieved June 25, 2026, from China Global Television Network website: <https://news.cgtn.com/news/2023-04-25/128th-joint-patrol-on-Mekong-River-begins-1ji55kynfS8/index.html>
- Chhin-Eng, K., & Siriwato, S. (2024). Examining the Effect of China Foreign Aid and Diplomacy on Cambodia Good Governance and Growth Stability. *NRCT Data Center*, 11(1), 19–30. <https://doi.org/10.14456/jcsh.2024.5>
- China Daily. (2024). Joint action transforms Mekong region. Retrieved from China Daily website: <https://global.chinadaily.com.cn/a/202412/28/WS676f3ff1a310f1265a1d5649.html>
- Demir, A. (2023). The Effect of China on ASEAN: The BRI Projects in Myanmar. *Frequency of International Relations (FETRIAN)*, 4(2), 126–147. <https://doi.org/10.25077/fetrian.4.2.126-147.2022>
- Dicarlo, J., & Lu, J. (2025). Chinese Investment in Laos. In *Knowledge for Development* (pp. 1–70). Vientiane: Lao Land for Life Project. Retrieved from Lao Land for Life Project website: <https://www.k4d.la/wp-content/uploads/2025/08/Chinese-Investment-in-Laos.pdf>
- Fathurahman, M., Lubis, F., & Gustianti, N. (2025). Peran ASEAN dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kawasan Golden Triangle. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10),

- 118–126. Jurnal Peneliti. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13012>
- Global Times. (2026, February 10). China, Laos, Myanmar and Thailand launch 162nd joint Mekong River patrol. Retrieved June 13, 2026, from Global Times website: <https://www.globaltimes.cn/page/202602/1355110.shtml>
- IMF. (2025, December 19). Lao P.D.R. 2025 Article IV Consultation: IMF Staff Concluding Statement. Retrieved May 28, 2026, from International Monetary Fund website: <https://www.imf.org/en/news/articles/2025/12/19/cs-lao-pdr-2025-article-iv-consultation-imf-staff-concluding-statement>
- ITC. (2025). China-Lao People's Democratic Republic Opportunities for Export Expansion Opportunities for value-added diversification. In *Intracen*. Geneva: International Trade Centre. Retrieved from International Trade Centre website: https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/dialxmx/china_laopdr_ep_final.pdf
- Johnston, L. (2018). The Belt and Road Initiative: What is in it for China? *Asia & the Pacific Policy Studies*, 6(1), 40–58. <https://doi.org/10.1002/app5.265>
- Kheuakham Chanlivong. (2025, April 24). Lao, China Bilateral Trade Increases to USD 8.23 Billion in 2024, Marking Significant Growth. Retrieved June 25, 2026, from Laotian Times website: <https://laotiantimes.com/2025/04/24/lao-china-bilateral-trade-increases-to-usd-8-23-billion-in-2024-marking-significant-growth/>
- Kim, S. (2021). China's Allocation of Foreign Aid to Southeast Asia: An Empirical, Comparative Analysis of Aid Donors (pp. 1–108). John Hopkins University. Retrieved from <https://jscholarship.library.jhu.edu/items/7db4e249-83c8-4230-b8cc-3f822bad6c43>
- KPL. (2025, June 27). China and Laos Cooperate to Build a Drug-Free Future. *Khaosan Pathet Lao*. Retrieved from <https://kpl.gov.la/EN/detail.aspx?id=92213>
- Lum, T., Fischer, H., Granger, J., & Leland, A. (2009). China's Foreign Aid Activities in Africa, Latin America, and Southeast Asia. In CRS (pp. 1–25). Congressional Research Service. Retrieved from Congressional Research Service website: https://www.everycrsreport.com/files/20090225_R40361_fa31038e563ffac667c96755c_dbded620318381c.pdf
- Ministry of Foreign Affairs. (2024). Informal Discussion between the Permanent Secretary for Foreign Affairs of Thailand and Foreign Ministers of China, Myanmar, and Lao PDR - กระทรวงการต่างประเทศ. Retrieved June 25, 2026, from Ministry of Foreign Affairs Kingdom of Thailand website: <https://www.mfa.go.th/en/content/informal-discussion-between-the-permanent-secretar?cate=5d5bcb4e15e39c306000683c>
- Ministry of Public Security. (2025, July 27). 155th joint patrol of Mekong River concludes. Retrieved from Ministry of Public Security of the People's Republic of China website: <https://www.mps.gov.cn/n2255079/n6865805/n7355748/n7913197/c10154857/content.html>
- Mirajiah, R. (2026). China's Foreign Aid to Countries in Southeast Asia During The Covid-19 Pandemic Massa. *International Journal of Education, Information Technology and Others (IJEIT)*, 5(3), 19–30. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6673150>
- NNCC. (2025, June 19). China Drug Situation in 2024. Retrieved June 18, 2026, from Ministry of Public Security of the People's Republic of China website: <https://www.mps.gov.cn/n2255079/n6865805/n7355748/n7355818/c10114681/content.html>

- OECD. (2024). Laos (LAO) and China (CHN) Trade. Retrieved June 23, 2026, from The Observatory of Economic Complexity website: <https://oec.world/en/profile/bilateral-country/laos/partner/chn>
- People's Daily Online. (2023). 131st Mekong River joint patrol completed . Retrieved June 25, 2026, from People's Daily website: <https://en.people.cn/n3/2023/0729/c90000-20051195.html>
- People's Daily Online. (2024). Greater Mekong Sub-region countries join hands to curb drug problems. Retrieved June 25, 2026, from People's Daily website: <https://en.people.cn/n3/2024/0626/c90000-20185779.html>
- Pina, C. (2023). China's International Police and Judicial Cooperation. In *IRSEM* (pp. 2–26). Paris: Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Retrieved from Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire website: https://www.irsem.fr/storage/file_manager_files/2025/03/rp-irsem-135-pina-cooperation-en.pdf
- Sguelgia, G. (2025, March 21). China-Laos Relations: Strategic Cooperation and Development Initiatives. *China Briefing*. Retrieved from <https://www.china-briefing.com/news/strengthening-china-laos-relations-strategic-cooperation/>
- Szep, J., & Marshall, A. (2012). In *Mekong, Chinese Murders and Bloody Diplomacy*. Reuters. Retrieved from Reuters website: <https://graphics.thomsonreuters.com/12/01/Mekong.pdf>
- The World Bank. (2020). From Landlocked to Land-Linked. In *The World Bank* (pp. 1–104). The World Bank. Retrieved from The World Bank website: <https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/c72cc1cf-b944-57e8-9f35-7deb6380269d/content>
- UNODC. (2009). The Government of the Lao PDR. In *UNODC* (pp. 1–26). UNODC. Retrieved from UNODC website: https://www.unodc.org/documents/laopdr/COLAO/NDCMP_Eng.pdf
- UNODC. (2017). *Mekong Memorandum of Understanding on Drug Control: Brochure*. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) website: https://www.unodc.org/roseap/uploads/archive/documents/Publications/2017/MOU_Brochure.pdf
- UNODC. (2022, December). UNODC EWA: “Tuci”, “happy water”, “k-powdered milk” – is the illicit market for ketamine expanding?. *UNODC*. Retrieved from <https://www.unodc.org/LSS/announcement/Details/206a7d54-8ef3-4012-8943-fcfac98644e6>
- UNODC. (2023). Mekong governments and UNODC agree to a new strategic plan for drug control. Retrieved from United Nations : UNODC Regional Office for Southeast Asia and the Pacific website: <https://www.unodc.org/roseap/en/2023/09/mou-mekong-drug-control-meeting/story.html>
- UNODC. (2025). World Drug Report 2025. In *UNODC* (pp. 1–98). UNODC. Retrieved from UNODC website: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/WDR25_B1_Key_findings.pdf
- US-China Embassy. (2024, June 20). China Drug Situation Report 2023_Embassy of the People's Republic of China in the United States of America. Retrieved from China-embassy.gov.cn website: https://us.china-embassy.gov.cn/eng/zggs/202406/t20240620_11438701.htm
- Vientiane Times. (2024, February 23). China on Track to become Laos' Top Trading Partner. *Vientiane Times*. Retrieved from https://www.vientianetimes.org.la/freefreeneews/freecontent_39_China_y24.php?fbclid

[=IwAR04qxxPDAFop4l8QWh7xVzAFCHgNWeXqNvxHYJcxvJcEJpMwFgp6B4OD5M](#)

- Wekke, I. (2019). Metode Penelitian Sosial. In *Research Gate* (1st ed., pp. 1–171). Yogyakarta: Gawe Buku. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/344211045_Metode_Penelitian_Sosial/link/5f5c132ea6fdcc11640bd740/download
- Xinhua. (2026, January 29). Lancang-Mekong countries see positive outcomes from joint anti-crime operation. *LMC China*. Retrieved from http://www.lmcchina.org/eng/lmhzdt/202601/t20260129_11847327.html
- YCIH. (2023, October 23). Action Plan for Building a China-Laos Community with a Shared Future (2024-2028). Retrieved June 15, 2026, from Yunnan Construction Investment Er'an (YCIH) website: <https://en.yn2an.cn/news/5443.html>